

# PENJAHAT PROLETAR ALA BAJURI

(Realisme dalam Komedi Situasi Bajaj Bajuri

Edisi 'Jalani Lebaran dalam Tahanan')

Oleh Djati Akindo

## **Abstrak**

Kemahadasyatan media massa, salah satunya terletak pada kemampuannya mengonstruksi wacana mengenai realitas atau lebih tepatnya kebenaran umum. Dalam kajian kritis, kemampuan media massa dalam mewacanakan realitas atau kebenaran umum tersebut justru seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan sebuah bentuk penjajahan baru dan relatif terselubung. Sebuah imperialisme budaya melalui media, yang tidak lagi dikaitkan dengan penguasaan fisik melainkan pada konstruksi *mental framed*, di mana strategi imperialisme dilakukan paralel dengan alih-alih pendidikan akan spirit pembebasan dan kesederajatan dalam kemasan citra modern. Artikel ini mencoba membongkar bagaimana sebuah komedi situasi; yaitu Bajaj Bajuri, sebagai salah satu produk media massa melakukan proses imperialisme budaya melalui media televisi tersebut. Sebagaimana disebut transisi bentuk imperialisme dari fisik menuju mental, maka imperialisme media ini terjadi justru melalui relasi kode-kode televisual yang disebarluaskan secara massif dan diperluas secara sosial, dalam tujuannya membangun sebuah realitas media. Sebuah realitas yang selektif, deterministik dan tentu saja partial, dan karena intensitas persebarannya dan fungsi naratifnya menjadikan realitas tersebut melebihi realitas sesungguhnya. Pembentukan *mental maps* yang dikonstruksi oleh fiksi media melalui 'berita' atau *content* media itu sendiri. Produksi pengetahuan pun terbentuk dan karena efek naratif serta massifnya menjadikan pengetahuan mengenai realitas (dari) media ini diterima secara umum dan membangun sebuah konsensus. Inilah mitos dalam dunia modern, yang dibangun dengan sokongan media massa sebagai produk budaya modern. dan sebagaimana peran mitos 'lama', maka mitos modern ini juga memberi satu-satunya pedoman berpikir dan bersosial masyarakat yang berada dalam wilayah geopolitik mitos tersebut. Dan pilihan yang tersedia untuk memahami realitas adalah sekedar benar atau salah, karena dalam realitas media tersebut kemudian menempel kepentingan ideologis kelas tertentu dan kemudian dalam upayanya untuk mengkonservasi dominasi suatu kelas atas kelas lain, maka bagi masyarakat dalam wilayah geopolitik

mitos bersangkutan tidak disediakan celah untuk melakukan negosiasi realitas atau kebenaran. Dalam mitos, realitas menjadi realitas ideologis, yang kemudian dianggap sebagai sebuah keyakinan yang keliru karena menyembunyikan relasi-relasi kelasnya.

**Keywords:** *imperialisme, imperialisme media, program televisi, komedi situasi kritis, lokalitas, modern mythology, mitos, produksi kreatif mitologi televisive, kritik ideologi*

## PENDAHULUAN

Representasi kita mengenai 'world' atau realitas selalu 'bergantung' dalam arti dikonstruksi oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan elemen-elemen diskursif sebagai instrumen penyokongnya, sehingga *world* atau realitas yang tersaji, kita terima apa adanya tanpa memberi kesempatan pada kita untuk memikirkan suatu pandangan yang lain (alternatif) untuk hadir dan mempertanyakannya. Pendapat ini harus dipahami dalam konteks bahwa realitas merupakan hasil perjuangan antar kelas atau kelompok yang ada dalam suatu wilayah geopolitik tertentu. Sehingga sangat mungkin realitas yang berlaku dan diyakini kebenarannya adalah realitas kelas 'pemenang'. Namun demikian untuk menjadi pemenang ada dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu kelas; pertama, suatu kelas harus mampu mempengaruhi pandangan suatu kolektif mengenai apa yang benar atau salah. Level ini bisa juga disebut sebagai perjuangan kelas untuk meraih, meminjam istilah Gramsci, konsensus. Kedua, untuk meraih syarat yang disebutkan pertama ini, maka suatu kelas harus mempunyai kemampuan produksi dan reproduksi wacana, di mana dalam poin ini media mempunyai peran yang signifikan. Media dalam konteks ini beralih fungsi sebagai instrumen ideologis kelas, yang menyuarakan kepentingan-kepentingan kelas yang diabdinya. Media melakukan fungsi, menurut Laclau dan Mouffe: *hegemonic closures* atau *struggle of class* menurut Barthes dalam upayanya mengonstruksi realitas kelas, termasuk di dalamnya identitas kelas; baik identitas kelas yang diabdinya maupun identitas kelas lainnya yang terlibat dalam

*struggle* tersebut. *Hegemonic closure* terwujud ketika realitas dinaturalisasikan melalui kode-kode televisual yang dikonstruksi dalam sebuah model narasi tertentu, dan ditampilkan seolah-olah bukan sebagai hasil konstruksi yang dengan cara-cara tertentu menetapkan sebuah makna yang *fix* dan sekaligus menutup kemungkinan bagi makna-makna potensial lain untuk muncul dan menjadi alternatif bagi pemaknaan yang berbeda dan mungkin berlawanan

Teori yang digunakan disini adalah teori Realisme John Fiske yang masuk dalam *cultural study* dan *Political Economy* Gramsci (dengan mempertimbangkan kritik Laclau dan Mouffe). Pemilihan teori ini memang bersifat ekstrem, di mana menurut Babe keduanya mempunyai genealogi yang berbeda dan bahkan berlawanan; *critical cultural study* yang idealis dan bersifat immaterial dan *critical political economy* yang reduksionis dan bersifat material yang masing-masing bersifat partial dan karenanya potensial untuk terjatuh dalam kepentingan-kepentingan politis tertentu. Rasionalisasi dua teori yang digunakan adalah, bahwa dengan Realisme John Fiske diandaikan konstruksi kode-kode televisual memproduksi atau mereproduksi sebuah realitas media yang bersifat naratif. Hal ini menjadikan realitas media tidak netral dan mengabdikan semata untuk kepentingan suatu kelas.

Semiotik sebagai metode (di mana Realisme Fiske masuk didalamnya), menurut Saukko, memberi keuntungan pada terbukanya kesempatan bagi suara-suara yang berbeda untuk berkontestasi dan berdialog. '*unity of consciousness*' tadi. Pada titik inilah hegemoni Gramsci dengan memasukkan nuansa politik dari Laclau dan Mouffe bisa masuk. Perpaduan semiotic dan *political economy* di sisi lain juga meminimalisir kelemahan dari *political economy* yang kurang detail melakukan analisis terhadap fenomena budaya tertentu.

Dialog antara dua teori tersebut kiranya mampu mengembalikan kebenaran pada singgасannya. Melalui konsep hegemoni Gramsci, dialog dari keberbedaan suara dalam liberalism semiotik memperoleh *background*-nya dalam membongkar historis

yang tercerabut dari teks yang menjadikan teks tersebut potensial menyembunyikan relasi dominatif atau tindakan-tindakan subordinasi suatu kelas. Menurut Gramsci hegemoni bersifat dinamis karena sebagai hasil dari *struggle of class* sehingga dapat dipahami pula bahwa hegemoni dapat dilakukan oleh semua kelas (baik yang *powerfull* maupun yang *powerless*), maka penyebarluasan *common-sense* inilah yang menjadi strategi dari kelas borjuis (dalam konsep Gramsci) untuk memenangkan hegemoni tersebut. Tujuan dari analisis dalam artikel ini adalah untuk melemahkan kekuasaan dengan mengungkapkan kenyataan ideologis, atau secara gambling membuka topeng kekuasaan dengan kebenaran (*to unmask power with truth*).

Sepakat dengan Saukko, maka metode yang digunakan untuk menganalisis dalam artikel ini adalah dengan memadu dua teori yang relative berbeda perspektifnya, yaitu: *political economy* Gramsci yang *determinisme* ekonomi dan realisme Fiske yang *poststrukturalis* dengan fokus pada bahasa sebagai suatu bentuk moda informasi. Ada beberapa strategi yang ditawarkan Saukko dalam metodenya, yaitu: *Collaboration*, *self-reflexivity* dan *polivocality* (Saukko, 2003: 55). Dalam artikel ini *self-reflexivity* menjadi pilihan utama, di mana keterbatasan waktu dalam eksplorasi komparasi mengenai wacana dominasi ideologis penguasa melalui program komedi situasi Bajaj Bajuri pada masyarakat Betawi dan non-Betawi yang menyaksikan komedi situasi tersebut tidak dilakukan, dan lebih focus pada *self-reflexivity* penulis dalam melihat kondisi ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh penguasa sebagai upaya membentuk *common-sense* atau pandangan umum yang membenarkan tindakan-tindakan koersifnya terhadap masyarakat lokal dan kelompok-kelompok sosial terpinggirkan seperti dicontohkan disini masyarakat Betawi sebagai representasi dari lokal dan sekaligus juga representasi dari proletar sebagai implikasi dari keterpinggiran mereka dari akses ekonomi.

## Realisme Fiske dan imperialisme media

Realitas dalam televisi menurut John Fiske merupakan produk atau konstruksi dari kode-kode budaya dan oleh karenanya tidak pernah bersifat netral ataupun universal, sebagaimana dikutip dibawah ini; "What passes for reality in any culture is that culture's codes, so 'reality' is always already encoded, it is never 'raw'." (Fiske, 2001: 5)

Dari pengertian inilah untuk kemudian realitas televisi dipahami Fiske secara negatif, karena merupakan hasil konstruksi budaya yang melibatkan partisipasi *code-code televisual* untuk mendukung *common-sense* dari *reality* yang tersajikan tersebut. Inilah realisme, sebuah konsep kritis untuk memahami konstruksi *reality* televisi yang ideologis dan politis sehingga program atau acara yang realistik menurut Fiske bukan karena kemampuannya untuk memproduksi *reality* secara jitu (tepat) atau sebagaimana adanya. Berikut ini penjelasan Fiske lebih lanjut;

"...not because it reproduces reality, which it clearly does not, but because it reproduces the dominant sense of reality. We can thus call television essentially realistic medium because of its ability to carry a socially convincing sense of the real. Realisme is not a matter of any fidelity to an empirical reality, but of the discursive conventions by which & for which a sense of reality is constructed." (Fiske, 2001: 21)

Televisi disebut sebagai medium realistik justru karena kemampuan televisi mereproduksi *reality* dalam pemahaman dominan; atau pada kemampuannya mengangkat apa yang dianggap riil tersebut dalam pemahaman sosial (secara sosial) atau kemampuannya menjadikan realitas tersebut menjadi sosial (*socially extended*). Realisme untuk kemudian justru membangun sebuah *false consciousness* mengenai realitas. Inilah realisme yang diterangkan Fiske sebagai seolah-olah menyajikan gambar-gambar yang *unmediated* mengenai *external reality* kedalam kode-kode televisual. Sebagai hasil dari *discursive conventions* maka definisi realisme di atas mengarahkan kita pada syarat berikutnya dari realitas televisi yaitu bahwa realitas ada, karena dibawa oleh wacana, di mana wacana diskursif direlaskan dalam tujuannya membangun sebuah realitas tertentu yang akan

disampaikan melalui televisi dengan sokongan dari *technical codes* sebagai *meta-discoursenya*. “The simple access to truth which is guaranteed by the meta-discourse depends on a repression of its own operations & this repression confers an imaginary unity of position on the reader from which the other discourse in the film can be read.” (MacCabe dalam Fiske, 2001: 35)

Realisme atau *reality* televisi menurut MacCabe harus memperoleh reaksi, karena mengemukakan ‘*the truth*’ yang terlihat sebagai ‘*factual*’, dan bukan sebagai konstruksi wacana dan budaya. Di mana ‘*the factual truth*’ disampaikan secara ‘*unspoken*’ dan memperoleh posisi utama dalam hierarki *meta-discourse* yang membangun ‘*truth*’ tadi dan memosisikan penonton untuk menerima ‘*truth*’ tersebut sebagai sesuatu yang objektif, memadai dan kemudian natural.

Secara umum Fiske membagi *the codes of television* menjadi tiga (3) level, yaitu *social codes*, *technical codes* dan *ideological codes*, berikut ini kategori masing-masing level tersebut:

Level 1: *Social codes* atau disebut sebagai ‘**Realitas**’  
Level 2: *Technical codes* atau disebut sebagai ‘**Representation**’,  
Level 3: *Ideological codes* atau disebut sebagai ‘**Ideology**’ (Fiske, 2001: 5)

Pada konteks inilah realisme Fiske memosisikan dirinya untuk membongkar ideologi dalam kemasan ‘*realitas*’ atau dari apa yang dianggap ‘*truth*’ tersebut dan kemudian memberinya arti dalam hubungannya dengan *class struggle*. Realitas dalam realisme untuk kemudian bukan menggambarkan realitas yang sebenarnya melainkan dibatasi pada ‘*what you’re looking for*’ sehingga berdimensi subyektif, politis dan ideologis. Bagi Fiske, media adalah alat atau instrumen ideologis kelas mapan, sehingga tentu saja realitas yang dibawa media penuh dengan muatan kepentingan ideologis kelas mapan tersebut.

Naturalisasi untuk menjadi konsep sangat terkait dengan realisme Fiske dan, meminjam konsep Hartley, dipahami sebagai ‘*the process of representing the cultural and historical as natural*’ dan oleh

karenanya *'are experienced as natural'*. *Naturalness*, menurut Fiske, diperoleh dari relasi antara *technical codes* dan *ideology* sehingga membuat *reality* yang disajikan oleh (dalam) televisi diterima sebagai *common-sense* dalam *society*. "The process of making sense involves a constant movement up and down through the levels of the diagram, for sense can only be produced when 'reality', representations, & ideology merge into a coherent, seemingly natural unity. (Fiske, 2001: 6)

Sementara bagi Barthes; realisme dipahami sebagai *ideological defense mechanism* yang memberi kontribusi yang besar dalam konstruksi Mitos di dunia Modern. Jika Barthes menyatakan bahwa produksi Mitos bisa saja dilakukan oleh *oppressor* maupun *oppressed*, namun *Television Culture* Fiske khusus mengembangkan dan mengeksplorasi realisme sebagai Mitos yang dilakukan oleh *oppressor*.

*Radicals voice* memang diberi ruang dan disajikan dalam realitas televisi namun digunakan dalam fungsinya 'menenangkan' tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak yang berbeda dan *finally* diabdikan demi *eternity of dominant values: kapitalisme atau otoritarianisme* misalnya. Dan n *'dominant ideology strengthens its resistance to anything radical by injecting itself with controlled doses of the disease'*. Dan *the truth is stolen*.

### **Gramsci; Media sebagai Instrumen produksi *Knowledge* dan Konsensus**

Ketika relasi kode-kode televisual yang membangun sebuah narasi ideologis tertentu tersebar luas dan ditambah dengan intensitas kemunculan kode-kode televisual tersebut; maka disinilah *common-sense* terbangun dan membentuk konsensus antara si penguasa media dan politis dengan (atau lebih tepatnya atas) masyarakat sipil. Imperialisme budaya melalui media pun terbangun atas berkat peran aktif media sebagai instrument ideologis kelas berkuasa. Subordinasi menjadi bias oleh justifikasi keumumman **realisme** media tersebut.

Untuk menguraikan fenomena sosial dalam artikel ini, untuk kemudian merasa perlu menggunakan teori Gramsci tentang Hegemoni untuk menjelaskan aksi sosial yang terjadi dan teori *Creating of meaning* dan dekonstruksi objektif dari Laclau dan Mouffe untuk menguraikan bagaimana aksi sosial yang disebut sebagai proses hegemoni tadi distabilisasikan oleh kelompok ideologi tertentu untuk menaturalisasi ideologinya sehingga diterima sebagai *common-sense*, sebagaimana dinyatakan oleh Laclau & Mouffe dalam Jorgensen & Phillips dibawah ini: "Through the production of meaning, power relation can become naturalized and so much part of common-sense." (Laclau & Mouffe dalam Jorgensen & Phillips, 2002: 32)

Meskipun Gramsci dalam tulisannya membedakan secara tegas antara dominasi dan hegemoni, namun hegemoni bisa diartikan sebagai dominasi mental, sebagai akibat dari konsensus kebenaran yang diperoleh dengan memanipulasi 'kesadaran' kelas. Berikut ini pembacaan Barrett mengenai pengertian hegemoni Gramsci; "Hegemony is best understood as the organization of consent, the processes through which subordinated forms of consciousness are constructed without recourse to violence or coercion." (Barrett dalam Jorgensen & Phillips, 2002: 32).

Hegemoni haruslah dipahami sebagai organisasi persetujuan, sebuah proses melalui bentuk-bentuk kesadaran yang menindas yang dikonstruksi tanpa kekerasan atau paksaan, selanjutnya;

"Hegemony is a social consensus, which masks people' real interest. The hegemonic processes take place in the superstructure and are part of a political field. Their outcome is not directly determined by the economy, and so superstructural processes assume a degree of autonomy and the possibility for working back on the structure of the base. It also means that through the creation of meaning in the superstructure people can be mobilized to rebel against existing conditions." (Gramsci dlm Jorgensen & Phillips, 2002: 32)



Melalui Laclau & Mouffe, hegemoni bisa diaplikasikan dalam ruang politik, sebagaimana dikutip dibawah ini; "There are no objective laws that divide society into particular groups, the groups that exist are always created in political, discursive processes." (Laclau & Mouffe dalam Jorgensen & Phillips, 2002: 33)

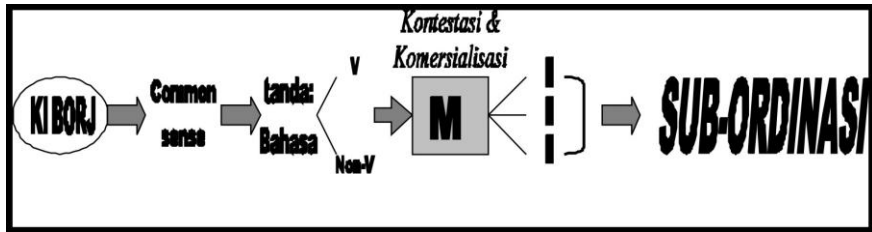
Menurut Laclau dan Mouffe, tidak ada hukum yang pasti, tepat atau *stagnan* dalam pengelompokan sosial (masyarakat), hal ini dikarenakan kelompok-kelompok sosial terbentuk berdasarkan proses diskursif politisnya (berdasarkan kepentingan politisnya). Sementara politik dipahami secara luas oleh Laclau & Mouffe sebagai; "Politics articulations determine how act and think and thereby how we create society. The more or less determining role of the economy is, then, completely abolished." (Laclau & Mouffe dalam Jorgensen & Phillips, 2002: 34).

*Base (economic dimension)* dan *superstructure* (agama, pendidikan dan lain sebagainya), menurut Laclau & Mouffe diproduksi dalam ruang yang sama dengan proses diskursif. Dalam pengertian ini maka 'realitas' sosial termasuk bahasa didalamnya merupakan entitas yang tidak pernah *fixed* dan *changeable*, sehingga membutuhkan usaha untuk mencari relas yang tepat untuk menaturalisasikannya. Permasalahan objektifikasi untuk kemudian dicapai melalui apa yang disebut Laclau & Mouffe: *discursive of production of meaning. Discursive struggle*, dan karena; "...that no discourse can be fully established, it is always in conflict with other discourses that define reality differently and set other guidelines for social action." (Laclau & Mouffe dlm Jorgensen & Phillips, 2002: 34)

*Media power* dalam mengonstruksi dan memapankan hegemoni justru menggenerasi disfungsi media dalam bentuk kekerasan media yang bekerja pararel dengan kekerasan ideologis. Meskipun menurut Gramsci hegemoni bisa dilakukan oleh kelas borjuis dan kelas proletar, namun kemampuan modal finansial dan otoritas yang bersifat historis menjadikan hegemoni lebih banyak dilakukan oleh kelas borjuis berkuasa.

Hegemoni Laclau dan Mouffe untuk kemudian dianggap mampu menyempurnakan keterbatasan definisi hegemoni Gramsci

yang kembali terjebak dalam diterminisme ekonomi dan mempersempit potensi analisis terhadap praxis hegemoni di luar relasi produksi tersebut. Ini skema posisi dan peran media dalam konsep hegemoni Gramsci yang oleh kelas borjuis



### Penjahat Proletar dan Otoritas Negara dalam kemasan ‘Bajaj Bajuri’

Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya tayangan media dalam berbagai genrenya tentunya juga potensial untuk menyembunyikan pesan-pesan ideologis politisnya, tidak terkecuali tayangan komedi sekalipun. Tayangan Bajaj Bajuri edisi ‘Jalani Lebaran dalam Tahanan’ pun, berdasarkan pandangan Fiske, secara kritis juga potensial untuk difungsikan sebagai instrument ideologis.

Secara singkat Bajaj Bajuri dalam episode ‘Jalani Lebaran dalam Tahanan’ ini bercerita tentang nasib apes Bajuri, sebagai tokoh utama, yang harus masuk tahanan karena terjaring Operasi Ketupat polisi dalam rangka pengamanan menjelang Lebaran. Diceritakan kemudian melalui dialog dan *shoot-shot*nya dengan Narapidana lain satu sel dengannya dan juga oleh Oneng, isteri Bajuri ketika menjelaskan kronologis masuknya Bajuri ke tahanan pada Mpok Minah.

sebagaimana dialog antara Emak dan Oneng untuk menengok dan sekaligus *halal bihalal* dengan Bajuri di Tahanan dibawah ini merepresentasikan keterbuangan Bajuri yang masih berstatus tersangka tergambarkan, dan oleh karenanya juga kehilangan hak-haknya sebagai teman atau sebagai anggota keluarga:

- Oneng** : Mak...kite ke penjara sekarang yok Mak.
- Emak** : Neng...sekarang ini hari Lebaran, waktunya kia pergi ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara, minta map-maapan. Bukannya ke penjara! (nada tinggi)
- Oneng** : Yee..tapi kan Oneng mau nengokin bang Juri Mak. Kasihan..
- Emak** : Heh! Biarin aja dia di penjara. Supaya ketupat ame sayur opornye awet!
- Oneng** : Ih...Emaaak...gitu banget.

Bang Juri kan laki Oneng, kasihan Mak, masak orang lain pada Lebaran, dia sendirian ngringkuk di penjara...

- Emak** : Gue tau dia laki elu...biarin aja dia di penjara. Kagak usah dikasihani emang dia penjahat!!!
- Oneng** : Bang Juri bukan penjahat!!! (sambil menghentak-hentakkan lembar kerudung di tangannya)
- Emak** : Kalo bukan penjahat ngapain dia ditangkep ama Polisi (dan Oneng pun diam tak tahu harus menjawab apa)

Dialog di atas dikonstruksi untuk membangun suasana konflik sosial keluarga yang menjadi satuan terkecil terkait dengan masuknya Bajuri di penjara yang menyebabkan kehilangan haknya untuk diakui dan diperlakukan sebagai bagian dari suatu keluarga. Realitas inilah yang diobyektifkan yang menurut Fiske justru menjadi selubung dari nilai-nilai ideologis tertentu. sikap-sikap yang menahan emosi yang harus dilakukan oleh proletar ketika mengalami kondisi-kondisi yang terasa tidak adil dan represif dari otoritas lain diluar dirinya. Visual Bajuri yang menunjuk untuk kemudian potensi dimaknai sebagai keberanian sosial proletar untuk memahami kejahatan dan penjahat, untuk kemudian tingkat paling menakutkan adalah pembunuhan;

Sebagaimana Ong menyatakan bahwa dalam masyarakat *oral* dasar, pengetahuan dibentuk dalam keterlibatan pengalaman, maka televisi sebagai bentuk sisa *oral* dasar berupaya membangun *common-sense* mengenai proses konstruksi pengetahuan proletar (sebagai kelas yang belum terindustrialisasikan) yang diperoleh dari sekedar pengalaman pribadi dan bukan hasil analisis mendalam.

Bagaimana Oneng yang biasanya dikesankan sebagai perempuan 'oon' bertransformasi menjadi 'lebih tahu' mengenai *Operasi Ketupat* yang melibatkan dirinya sebagai istri Bajuri yang ditahan karena *Operasi Ketupat* tersebut.

**Minah :** Saya cuman penasaran doang...kenapa Bang Juri masuk penjara..

**Emak :** Semalam dia ketangkap. Nyolong ketupat.

**Minah :** Maap pok Oneng...masak iya Bang Juri nyolong ketupat?

**Oneng :** Bukannya nyolong ketupat!..hik..hik..kena O..pe..ra...si.. Ketupat. Karena polisi mau ngamanin Lebaran...hik...hik..

**Minah :** Maap pok Oneng bukannya saya nggak ngerti, bukannya saya nggak paham. Cuman saya nggak tahu kenapa polisi nangkap Bang Juri?!

**Oneng :** Waktu polisi meriksa Bajajnya Bang Juri...hik...didalam Bajajnya ada shabu shabuuuu....hik..hik.

**Minah :** Maap pok Oneng...emangnya kalok Lebaran kita nggak boleh beli masakan Jepang ya? (dengan ekspresi yang masih tidak tahu)

**Oneng :** Hiee....(memeluk Emak)

Praxis ideologi juga diperkuat dalam *scene* di mana Emak, Oneng dan Pok Minah terlibat pembicaraan mengenai alasan Bajuri masuk penjara berikut ini;

Ide salah tangkap dengan demikian secara ideologis dicitrakan dalam *visual* Bajaj bajuri menjadi suatu yang harus dianggap lazim dan prosedural dan oleh karenanya harus diterima sebagai cobaan untuk lebih bersikap hati-hati, dan kemudian harus menyikapinya dengan sabar dan kuat karena peristiwa salah tangkap ini sekedar cobaan atas ketidakhati-hatian proletar, dan salah proletar karenanya bukan kesalahan prosedural polisi sebagai representasi dari pemerintah yang hanya menjalankan tugasnya.

---

## **Realisme Penjahat Proletar sebagai Sebuah Praxis Hegemoni**

Ideologi dalam pandangan Marxisme dan media study dimaknai secara negatif dan mendapat kritik. Ideologi dikritik sebagai sebuah *fixing of meaning* atau *neutralization* yang sangat erat kaitannya dengan relasi sosial yang dominatif, di mana ideologi bekerja dalam praksis-praksis penindasan yang justru secara sistematis dan diskursif melestarikan relasi-relasi kekuasaan tertentu. Inilah mengapa ideologi disebut sebagai instrumen kekuasaan kelas dan mengabdikan pada kelas tersebut. Dalam konteks yang demikian ideologi dapat diartikan kemudian sebagai alat produksi dan diseminasi keyakinan-keyakinan yang salah dan keliru. Media menjadi instrument yang penting dalam konsep hegemoni Gramsci, di mana melalui media ideologi disebarluaskan dan memperoleh efeknya secara dramatis dan efektif. Sebagaimana dipahami dalam Fiske, relaitas yang selektif dan parsial, diterima dan dipahami sebagai realitas sebenarnya salah satunya karena 'kemasan' naratifnya. Gramsci tidak secara mentah meninggalkan tindakan koersif dari konsep hegemoninya, hanya saja konsensus sebagai syarat utama terwujudnya kondisi hegemonic, menjadikan tindakan-tindakan koersif menjadi sah, benar dan legal dilakukan. Demikian juga realisme Bajaj Bajuri difungsikan, bagaimana relasi naratif dari kode-kode televisual membangun suatu pemahaman baru mengenai penjahat negara.

Distorsi realitas dalam realisme Penjahat proletar ala Bajuri ini dikonstruksi paralel dengan upaya negara sebagai masyarakat politik untuk membiaskan realitas yang kompleks mengenai praktik hukum dan peradilan nasional. Bagaimana pemahaman mengenai jahat dan adil dipangkas sedemikian rupa dengan mengeksklusi kemungkinan lain identifikasi tentang jahat dan tindakan kejahatan seperti misalnya tindakan korupsi, *genocide* era 65 misalnya penculikan dan pembunuhan politis. Pengetahuan tentang jahat dan kejahatan dibatasi pada wilayah relasi yang sederhana dan meniadakan faktor lain yang sangat mungkin bercampur dan menjadikan jahat dan tindakan kejahatan dapat dioperasikan dan dipahami secara kompleks.

Dalam konteks tiga tantangan tersebut, artikel ini menempatkan poin ketiga sebagai pilihan untuk memperkaya pembahasan Bajaj Bajuri sebagai instrumen hegemoni penjajah negara yang dilakukan oleh negara sebagai pemegang kuasa politik. Pemaparan hegemoni sebagai upaya melakukan transformasi sosial dari kelas berkuasa, menurut Gramsci, dilakukan dengan membangun sebuah *common-sense*, hanya saja *common-sense* ini bersifat ideologis dan karenanya memuat suatu kepentingan politik kelas tertentu. Sebagaimana realisme penjajah proletar ala Bajuri diuraikan di atas, mampu membangun suatu mental map tentang definisi penjajah negara yang disederhanakan menjadi khas proletar dan menutup kemungkinan untuk masuknya aktor-aktor lain atau tipe lain yang mempunyai konsekuensi sosial yang relative sama atau melebihi tipe proletar tersebut. Inilah yang disebut Gramsci sebagai *hegemonic closure*, yang menjadikan kesadaran kondisi ketertindasan dari kelas proletar, dalam hal ini lokal yang dicontohkan dengan Betawi) tidak terbentuk, sehingga '*unity of consciousness*' dari lokal yang proletar tersebut menjadi jauh dari jangkauan. Dan transformasi pun tidak terjadi dengan perubahan struktur dominasi, dominasi tetap milik dari negara yang borjuis.

Hegemonic closure dalam artikel ini terjadi melalui realisme media yang meskipun menyajikan keberagaman bersuara dari lokal dan kelompok sosial lain terpinggirkan, namun toh hanya berada pada tataran bentuk saja dan bukan secara esensial. Sebagaimana disebutkan oleh Robertson, di mana isu multikulturalisme yang muncul sebagai implikasi historis dari tuntutan kesederajatan dari kelas-kelas minoritas di Amerika, menjadikan isu ini signifikan dan mendesak untuk dicari solusinya agar sebagaimana tujuan awalnya untuk menjamin modernitas dapat dilaksanakan secara efektif. Menjadi berbeda kemudian dengan apa yang dikemukakan Gramsci, bahwa kondisi hegemonic hanya bisa efektif dengan mempertahankan kondisi ketidakseimbangan termasuk didalamnya ketidakseimbangan informasi. Rasionalisasi dari hal ini adalah, bahwa dalam kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, keberagaman etnis, informasi atau perspektif dijamin semata-mata demi mempertahankan ketidakpastian yang berjalan paralel dengan

arogansi kelas atau perspektif. Kondisi ini potensial untuk membuka celah terjadinya chaos, hanya dalam kondisi tidak pasti seperti ini intervensi pemerintah dalam wacana nasional dan negara global dalam wacana internasional dapat dilakukan, dan koersif menjadi hal yang wajar dan legal ketika keyakinan dominan mengalami krisis.

Dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, maka Betawi sebagai proletar yang diberi ruang, harus dipahami secara kritis. Alih-alih menegakkan demokrasi sebagaimana yang didesakkan oleh negara-negara global demi menjaminkan efektifitas modernitas yang tentu saja ideologis, pada praksisnya justru memproduksi suatu pengetahuan mengenai demokrasi yang bias. Alasan yang paling mungkin disertakan untuk menjelaskan kondisi ini adalah, bahwa desakan-desakan internasional yang tak terelakkan, salah satunya sebagai konsekuensi dari tindakan bantuan asing, menjadikan negara sebagai agen dari kepentingan internasional. Kasuistik di Indonesia di mana kuasa politik bertumpang tindih dengan kuasa ekonomi menjadikan media sebagai saluran informasi yang tidak netral dan bahkan politis. Baik negara nasional maupun internasional, berjuang untuk membangun sebuah konsensus yang menjamin dominasinya atas kelas terpinggirkan lain di atas kemungkinan-kemungkinan perpecahan keyakinan dan politis yang tetap dipertahankannya dalam tujuannya membangun celah intervensi ketika 'penguasa' mengalami krisis hegemoni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam David Morton, 2007 *Unravelling Gramsci; Hegemony and Passive Revolution in The Global economy*, London, Pluto Press.
- Denis McQuail, Peter Golding and Els de Bens, 2005 *Communication Theory & Research; An EJC Anthology*, London, Sage Publication.
- Howard Davis & Paul Walton ed, 1984 *Language, Image, Media*, England, Basil Blackwell Publisher Limited.
- James T. Siegel, 2000 *Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*, Yogyakarta, LKiS
- John Fiske, 2001 *Television Culture*, London, Routledge
- Marianne Jorgensen & Louise Phillips, 2002 *Discourse Analysis as Theory and Method*, London, SAGE Publications Ltd
- Meenaksi G. Durham & Douglas M. Kellner ed, 2006 *Media & Cultural Studies Keywords*, Australia, Blackwall Publishing.
- Mike Wayne, 2003 *Marxism & Media Studies: Key Concepts & Contemporary Trends (Marxism & Culture)*, London, Pluto Press.
- Paula Saukko, 2003 *Doing Research in Cultural Studies An Introduction to Classical & New Methodological Approach*, London, Sage Publication.
- Robbie Robertson, 2003 *The Three Waves of Globalization; A History of a Developing Global Consciousness*, London, Fernwood Publishing
- Robert E. Babe, 2009 *Cultural Studies and Political Economy; Toward a New Integration*, New York, Lexington Books
- Roger Simon, 1999 *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Roland Barthes, 1983 *Mythologies*, New York, Granada Publishing
- Walter J. Ong, 1988 *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*, New York, Routledge